



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

#BerAKHLAK >

PERUBAHAN RENJA 2025

DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA DUMAI



perkim.dumaikota.go.id



disperkimkd22@gmail.com



Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja APBD Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai ini dapat disusun.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai dokumen perencanaan kegiatan pada APBD Perubahan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kami dalam menyusunnya, kami memberikan yang terbaik dalam penyajian Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini.

Demikian dokumen ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi penerima mandat, di mana proses penyusunannya telah diupayakan memenuhi sistem dan mekanisme sebagaimana ditetapkan. Disadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, untuk itu saran-saran penyempurnaan sangat diharapkan.

Dumai, 21 Juli 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA DUMAI**



SUHERMAN, S.Sos
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19680715 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah ...	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian IKU sampai dengan Triwulan I	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	22
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	22
BAB IV Penutup	36

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah yang secara teknis melaksanakan tugas-tugas dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja ini bertujuan agar program, kegiatan dan sub kegiatan di Sekretariat, Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai pada tahun 2025 memiliki tujuan dan sasaran yang jelas.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai perlu menyampaikan Perubahan Rencana Kerja yang dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai selama satu tahun, kendala-kendala yang dihadapi dan program kerja ke depan guna pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Implementasi rencana pembangunan tahun 2025 telah berlangsung selama 1 (satu) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan. Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD

menjadi pedoman penyusunan RAPBD untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka perlu disusun pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sehingga dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah memiliki panduan terkait hal-hal yang diperlukan untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan mengacu pada dokumen Perubahan RKPD tahun 2025.

Adapun proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat lihat dalam beberapa tahapan di bawah ini :

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan.
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas perumusan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyajian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
4. Perumusan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
5. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. penutup
6. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BAPPEDA untuk diverifikasi.

7. Penyampaian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Yang menjadi sandaran dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 adalah beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
 14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E);
 15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 10 Seri D).

16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Walikota Dumai 28 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 dan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sampai dengan Triwulan I tahun 2025;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025 dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran-gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Capaian IKU sampai dengan Triwulan II

Bagian ini memuat revidi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan TW II.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target indikator kinerja pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini melampirkan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian IKU sampai dengan Triwulan II

Capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai pada Tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja tahun bersangkutan. Tahun Anggaran 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai menerima anggaran pengeluaran senilai Rp. 16.112.382.371,84 yang digunakan untuk membiayai 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Dumai dan DAK Fisik, dengan jumlah realisasi sampai dengan Triwulan II (Juni) Tahun 2025 sebesar Rp. 4.686.842.216,07 atau persentase realisasi sebesar 29,09%.

Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan anggaran daerah sampai dengan Triwulan I (Februari) Tahun 2025 disajikan pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
FORMULIR E.60 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja DISPERKIM Kota Dumai
Periode Pelaksanaan: T.A 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran		Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra DISERKIM pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DISERKIM sampai dengan Renja DISPERKIM Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DISPERKIM Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja DISPERKIM yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DISERKIM s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
1	Sasaran Kota	Sasaran Perangkat Daerah				K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	Meningkatnya Infrastruktur Kota		1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			185.373.811.824,00				16.112.382.371,84	K	Rp	K	Rp							
A	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100	32.854.534.485,00	100	14.065.196.901,00	100	4.381.786.361,75	19,04	853.054.060,00	24,82	1.069.176.414,00	43,87	1.922.230.474,00	100	15.987.427.375,00	100,00%	48,66%	
1			1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25	163.033.750,00	5	12.587.750,00	3	6.581.500,00	0,00	0,00	0,82	1.800.000,00	0,82	1.800.000,00	5,82	14.387.750,00	23,28%	8,83%	
1.1			1.04.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	163.033.750,00	5	12.587.750,00	3	6.581.500,00	0,00	0,00	0,82	1.800.000,00	0,82	1.800.000,00	5,82	14.387.750,00	52,91%	8,83%	
2			1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	8	20.677.426.898,00	4	9.846.084.370,00	2	3.024.525.558,00	0,40	623.296.672,00	0,47	682.076.639,00	0,86	1.305.373.311,00	4,86	11.151.457.681,00	60,79%	53,93%	
2.1			1.04.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	104	20.576.145.298,00	54	9.834.739.370,00	25	3.015.220.858,00	4,96	623.296.672,00	5,87	682.076.639,00	10,82	1.305.373.311,00	64,82	11.140.112.681,00	62,33%	54,14%	
2.2			1.04.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	8	101.281.600,00	4	11.345.000,00	2	9.304.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	11.345.000,00	50,00%	11,20%	
3			1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22	108.455.804,00	8	9.879.000,00	6	19.805.613,00	0,00	0,00	1,44	4.749.000,00	1,44	4.749.000,00	9,44	14.628.000,00	42,90%	13,49%	
3.1			1.04.01.2.03.00.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6	31.722.515,00	2	1.550.000,00	2	9.451.381,00	0,00	0,00	1,00	4.749.000,00	1,00	4.749.000,00	3,00	6.299.000,00	50,08%	19,86%	
3.2			1.04.01.2.03.00.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	31.722.515,00	2	5.310.000,00	2	4.702.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5.310.000,00	33,33%	16,74%	
3.3			1.04.01.2.03.00.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	10	45.010.774,00	4	3.019.000,00	2	5.651.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3.019.000,00	40,00%	6,71%	
5			1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	737	3.668.380.004,00	733	1.319.271.942,00	2	202.975.368,25	0,00	170.000,00	0,74	75.389.000,00	0,74	75.559.000,00	733,74	1.394.830.942,00	99,56%	38,02%	
5.1			1.04.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	72.543.400,00	8	15.830.000,00	4	2.862.500,00	0,00	0,00	1,80	1.285.000,00	1,80	1.285.000,00	9,80	17.115.000,00	61,22%	23,59%	

No	Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra DISERKIM pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DISERKIM sampai dengan Renja DISPERKIM Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DISPERKIM Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja DISPERKIM yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DISERKIM s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2				3		4		5		6		7		8				12		13 = 6 + 12	
1	Sasaran Kota	Sasaran Perangkat Daerah																				
5.2			1.04.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	786.151.070,00	10	190.086.000,00	4	51.123.597,08	0,00	0,00	2,61	33.408.000,00	2,61	33.408.000,00	12,61	223.494.000,00	70,08	28,43	
5.3			1.04.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	28	258.931.376,00	14	47.433.000,00	3	17.746.710,67	0,00	0,00	0,67	3.986.000,00	0,67	3.986.000,00	14,67	51.419.000,00	52,41	19,86	
5.4			1.04.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20	194.936.000,00	10	48.530.000,00	5	23.908.633,00	0,00	0,00	0,48	2.280.000,00	0,48	2.280.000,00	10,48	50.810.000,00	52,38	26,06	
5.5			1.04.01.2.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	733	34.789.336,00	731	11.215.000,00	1	4.242.500,00	0,04	170.000,00	0,57	2.410.000,00	0,61	2.580.000,00	731,61	13.795.000,00	99,81	39,65	
5.6			1.04.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	2.321.028.822,00	2	1.006.177.942,00	1	103.091.427,50	0,00	0,00	0,31	32.020.000,00	0,31	32.020.000,00	2,31	1.038.197.942,00	57,76	44,73	
6			1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160	1.015.090.701,00	40	338.739.000,00	12	129.360.000,00	0,00	0,00	9,24	99.650.000,00	9,24	99.650.000,00	49,24	438.389.000,00	30,78	43,19	
6.1			1.04.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	91	1.015.090.701,00	40	338.739.000,00	12	129.360.000,00	0,00	0,00	9,24	99.650.000,00	9,24	99.650.000,00	49,24	438.389.000,00	54,11	43,19	
7			1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38	5.408.382.174,00	28	1.932.906.522,00	3	866.842.322,50	0,77	214.837.388,00	0,61	184.911.775,00	1,38	399.749.163,00	29,38	2.332.655.685,00	77,32	43,13	
7.1			1.04.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15	23.004.872,00	13	7.046.500,00	1	4.508.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	7.046.500,00	86,67	30,63	
7.2			1.04.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	210.851.200,00	2	33.600.000,00	1	19.680.000,00	0,14	2.800.000,00	0,21	4.200.000,00	0,36	7.000.000,00	2,36	40.600.000,00	58,89	19,26	
7.3			1.04.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15	5.174.526.102,00	13	1.892.260.022,00	1	842.653.564,00	0,26	212.037.388,00	0,20	180.711.775,00	0,47	392.749.163,00	13,47	2.285.009.185,00	89,77	44,16	
8			1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126	1.813.765.154,00	70	605.728.317,00	36	131.696.000,00	4,03	14.750.000,00	5,63	20.600.000,00	9,66	35.350.000,00	79,66	641.078.317,00	63,22	35,35	
8.1			1.04.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	28	900.206.440,00	12	398.401.789,00	7	91.708.000,00	0,90	11.800.000,00	1,16	15.160.000,00	2,06	26.960.000,00	14,06	425.361.789,00	50,21	47,25	
8.2			1.04.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	574.001.000,00	10	163.681.528,00	4	20.988.000,00	0,56	2.950.000,00	1,04	5.440.000,00	1,60	8.390.000,00	11,60	172.071.528,00	58,00	29,98	
8.3			1.04.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	68	339.557.714,00	48	43.645.000,00	25	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	43.645.000,00	70,59	12,85	

No	Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra DISERKIM pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DISERKIM sampai dengan Renja DISPERKIM Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DISPERKIM Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja DISPERKIM yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DISERKIM s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%	
	Sasaran Kota	Sasaran Perangkat Daerah			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
B	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	5.305.450.000,00	100	217.503.567,00	100	1.054.191.596,00	0,00	0,00	17,07	180.000.000,00	17,07	180.000.000,00	100	397.503.567,00	100,00%	7,49%
9			1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	18	805.450.000,00	6	91.443.567,00	4	175.131.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	91.443.567,00	33,33%	11,35%
9.1			1.04.02.2.01.00.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	5	345.450.000,00	3	74.667.567,00	1	66.221.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	74.667.567,00	60,00%	21,61%
9.2			1.04.02.2.01.00.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	4	160.000.000,00	2	5.800.000,00	1	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5.800.000,00	50,00%	3,63%
9.3			1.04.02.2.01.00.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	3	150.000.000,00	0	-	1	13.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9.4			1.04.02.2.01.00.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	150.000.000,00	1	10.976.000,00	1	83.678.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10.976.000,00	33,33%	7,32%
10			1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	150	300.000.000,00	50	6.060.000,00	50	39.103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.060.000,00	33,33%	2,02%
10.1			1.04.02.2.02.00.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	150	300.000.000,00	50	6.060.000,00	50	39.103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.060.000,00	33,33%	2,02%
11			1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	30	2.100.000.000,00	10	120.000.000,00	10	833.325.000,00	0,00	0,00	2,16	180.000.000,00	2,16	180.000.000,00	12,16	300.000.000,00	40,53%	14,29%
11.1			1.04.02.2.03.00.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	30	2.100.000.000,00	10	120.000.000,00	3	310.900.000,00	0,00	0,00	1,74	180.000.000,00	1,74	180.000.000,00	11,74	300.000.000,00	39,12%	14,29%
11.2			1.04.02.2.03.00.11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena	30	2.100.000.000,00	0	-	7	522.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

No	Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra DISERKIM pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DISERKIM sampai dengan Renja DISPERKIM Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DISPERKIM Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja DISPERKIM yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DISERKIM s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%
	Sasaran Kota	Sasaran Perangkat Daerah			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1				yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)																
12			1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	30	2.100.000.000,00	0	0,00	1	6.631.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1			1.04.02.2.04.00.03	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	30	2.100.000.000,00	0	-	7	6.631.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	100	83.623.740.698,00	55,48	20.197.097.156,64	77,87	2.592.477.157,51	3,35	111.535.000,01	2,37	78.780.000,00	5,72	190.315.000,01	61,20	20.387.412.156,65	61,20	24,38
13			1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	9	3.958.596.534,00	4	352.790.634,00	3	491.148.850,00	0,00	0,00	0,40	65.720.000,00	0,40	65.720.000,00	4,40	418.510.634,00	48,90	10,57
13.1			1.04.03.2.02.00.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Terreview/ Terlegalisasi (Laporan)	9	2.698.858.000,00	3	255.419.682,00	3	304.371.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	255.419.682,00	33,33	9,46
13.2			1.04.03.2.02.00.12	Pembentukan/Pembiinan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	3	429.869.267,00	1	752.000,00	1	29.275.000,00	0,00	0,00	0,12	3.620.000,00	0,12	3.620.000,00	1,12	4.372.000,00	37,46	1,02
13.3			1.04.03.2.02.00.14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	3	429.869.267,00	0	-	1	22.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4			1.04.03.2.02.00.15	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	450	400.000.000,00	250	96.618.952,00	100	134.742.000,00	0,00	0,00	46,09	62.100.000,00	46,09	62.100.000,00	296,09	158.718.952,00	65,80	39,68
14			1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	216,73	79.665.144.164,00	67,02	19.844.306.522,64	168,76	2.101.328.307,51	8,96	111.535.000,01	1,05	13.060.000,00	10,01	124.595.000,01	77,03	19.968.901.522,65	35,54	25,07
14.1			1.04.03.2.03.00.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	516	33.800.000.000,00	18	439.138.532,00	21	770.757.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	439.138.532,00	3,49	1,30
14.2			1.04.03.2.03.00.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	7	1.765.113.014,00	4	431.237.570,00	1	28.395.000,00	0,00	0,00	0,46	13.060.000,00	0,46	13.060.000,00	4,46	444.297.570,00	63,71	25,17

No	Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra DISERKIM pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DISERKIM sampai dengan Renja DISPERKIM Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DISPERKIM Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja DISERKIM yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DISERKIM s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp								
1	Sasaran Kota	Sasaran Perangkat Daerah																				
			Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)																		
14.3			1.04.03.2.03.00.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	3	90.000.000,00	1	20.883.500,00	1	12.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20.883.500,00	33,33 %	23,20 %	
14.4			1.04.03.2.03.00.09	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	216,73	9.600.000.000,00	67,02	417.522.772,64	168,76	119.928.030,51	156,95	111.535.000,01	0,00	0,00	156,95	111.535.000,01	223,97	529.057.772,65	103,34 %	5,51 %	
14.5			1.04.03.2.03.00.12	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit Rumah)	639	34.410.031.150,00	373	18.535.524.148,00	13	1.169.797.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	18.535.524.148,00	58,37 %	53,87 %	
D	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	100	19.500.000.000,00	45,5	2.335.325.084,00	73,02	2.688.235.819,00	2,44	90.000.000,00	21,27	783.230.000,00	23,72	873.230.000,00	69,22	3.208.555.084,00	69,22 %	16,45 %	
15			1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	300	19.500.000.000,00	70	2.335.325.084,00	25	2.688.235.819,00	0,84	90.000.000,00	7,28	783.230.000,00	8,12	873.230.000,00	78,12	3.208.555.084,00	26,04 %	16,45 %	
15.1			1.04.04.2.01.00.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	300	19.500.000.000,00	0	-	13	605.247.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
15.2			1.04.04.2.01.00.04	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit Rumah)	300	19.500.000.000,00	70	2.335.325.084,00	12	2.065.731.870,00	0,52	90.000.000,00	4,55	783.230.000,00	5,07	873.230.000,00	75,07	3.208.555.084,00	25,02 %	16,45 %	
15.3			1.04.04.2.01.00.05	Penatausahaan Serah Terima Rumah Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	300	19.500.000.000,00	0	-	1	17.256.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
E	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100	44.090.086.641,00	71,43	13.341.269.127,50	78,57	5.395.691.437,58	19,24	1.318.732.625,39	2,91	202.334.116,67	22,15	1.521.066.742,06	93,58	14.862.335.869,56	93,58 %	33,71 %	

No	Sasaran		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra DISERKIM pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra DISERKIM sampai dengan Renja DISPERKIM Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja DISPERKIM Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja DISPERKIM yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra DISERKIM s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	Sasaran Kota	Sasaran Perangkat Daerah																			
	serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota																			
16			1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	28	44.090.086.641,00	37	13.341.269.127,50	12	5.395.691.437,58	2,94	1.318.732.625,39	0,44	202.334.116,67	3,38	1.521.066.742,06	40,38	14.862.335.869,56	144,22%	33,71%
16.1			1.04.05.2.01.00.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	5	1.481.617.093,00	2	428.689.093,00	1	84.950.000,00	1,00	84.950.000,00	0,00	0,00	1,00	84.950.000,00	3,00	513.639.093,00	60,00%	34,67%
16.2			1.04.05.2.01.00.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	28	41.154.431.298,00	38	12.779.569.934,50	12	5.259.208.329,58	2,82	1.233.782.625,39	0,45	198.714.116,67	3,27	1.432.496.742,06	41,27	14.212.066.676,56	147,39%	34,53%
16.3			1.04.05.2.01.00.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	8	1.454.038.250,00	4	133.010.100,00	1	42.185.500,00	0,00	0,00	0,09	3.620.000,00	0,09	3.620.000,00	4,09	136.630.100,00	51,07%	9,40%
16.4			1.04.05.2.01.00.10	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengebang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengebang (Laporan)	8	1.454.038.250,00	0	-	1	9.347.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
JUMLAH						185.373.811.824,00				16.112.382.371,84		2.373.321.685,40		2.313.520.530,67		4.686.842.216,07		54.843.234.052,21			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											15%	14,73%	18%	14,36%	33%	29,09%					
Predikat Kinerja											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	1. Peran aktif Pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Perkim 2. Komitmen Dinas Perkim dalam menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada 3. Dukungan peraturan terkait teknis pelaksanaan kegiatan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja	1. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM), data dan dana2. Pembagian kewenangan urusan/program yang terbatas dan bersifat tertentu3. Koordinasi antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat belum optimal																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	1. Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan 2. Koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait perlu terus ditingkatkan dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	1. Menyiapkan data dan informasi program terkait yang akurat dan lengkap 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kerja sama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam program tersebut 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal 4. Meningkatkan upaya koordinasi program kegiatan yang melibatkan APBN dan Banku Provinsi agar kegiatan terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan																				

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dijelaskan bahwa :

1. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan adalah adanya fokus dalam mengarahkan atau menetapkan langkah-langkah perencanaan yang tepat dan matang, dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan pemahaman tugas sebagai penyeimbang dalam melaksanakan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
2. Penyebab tidak terpenuhinya target kinerja adalah Proses persiapan kegiatan masih berjalan, belum optimalnya *Capacity Building* bagi penyelenggaraan swakelola, tim pelaksana dan tim pengawas atau organisasi masyarakat serta penerima manfaat dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat; Pembagian kewenangan urusan/program yang terbatas dan bersifat tertentu.
3. Implikasi yang timbul dari penetapan langkah-langkah untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah adanya koordinasi serta pemahaman akan tugas serta dedikasi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.
4. Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan anggaran untuk rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai adalah melakukan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan kinerja berbasis teknologi, informasi dan meningkatkan kemampuan SDM Aparatur.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kerja sama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam program tersebut dan mengharapkan kebijakan pusat antar instansi vertikal yang ditujukan ke Pemerintah Daerah berjalan dengan sesuai aturan yang terarah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai kewenangan dengan sumber dana APBN (DAK).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam program perumahan/infrastruktur dan kawasan

permukiman, maka dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai selalu menjalankan fungsi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pengembangan teknologi guna mengoptimalkan Rencana Kerja yang sudah di tetapkan.

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional/ IKK	Satuan	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman		%	64,77	75,72	85,48	65,07		100	
2.	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh		%	33,60	55,73	77,87	30,92		100	
3.	Persentase Rumah yang Aman Pasca Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		%	100	-	-	-		-	
4.	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		%	-	100	100	100		100	
5.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU		%	60,71	71,43	78,57	64,29		100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sudah dapat terukur sesuai dengan kebutuhan per tahunnya apabila kelemahan serta kekurangan yang ada dijadikan suatu cambuk untuk memberi pelayanan yang lebih baik lagi. Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan masyarakat adalah dengan tercapainya target kinerja tiap tahunnya, pencapaian target kinerja ini dapat diperoleh apabila terjadi koordinasi dan sinergi yang sejalan antara pelaksana program sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Di dalam menyelenggarakan roda pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai terus berupaya melakukan pembenahan di segala bidang, permasalahan demi permasalahan selalu muncul, hal ini memerlukan penanganan yang lebih sehingga permasalahan yang ada dapat ditekan semaksimal mungkin, adapun setelah dilakukan pemetaan permasalahan maka dapat diidentifikasi pada tabel 2.2

Tabel 2.2

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Pogram dan Kegiatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terdapatnya rumah tidak layak huni	1.1 Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni	1.1.1 Terbatasnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
2	Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	2.1 Luasnya permukiman yang memerlukan infrastruktur dasar yang layak 2.2 Jangkauan penyediaan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh	2.1.1 Besarnya jumlah permukiman yang belum mendapat layanan infrastruktur dasar 2.2.1 Masih belum meratanya cakupan komponen prasarana, sarana dan utilitas umum yang dibangun

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Masih terdapatnya luasan kawasan kumuh di Kota Dumai	3.1 Kawasan kumuh	3.1.1 Luasnya permukiman kumuh 3.1.2 Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang belum terencana dan teratur

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi tentunya akan menjadikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai bisa lebih meningkatkan lagi kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana serta pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang bermutu dan profesionalitas.

Dengan dilakukannya perubahan dalam sistem manajemen baik itu pelayanan maupun peningkatan sarana dan prasarana yang ada di berbagai bidang, maka berdampak kepada visi dan misi kepala daerah dalam rangka pembangunan Kota Dumai ke depan, isu-isu strategis mengenai pencapaian kinerja haruslah sesuai dan sejalan dengan visi pembangunan Kota Dumai ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin di capai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Dumai.

Dampak terhadap misi pembangunan Kota Dumai adalah bahwa dengan peningkatan pelayanan yang bermutu dan profesional guna menciptakan derajat kehidupan masyarakat yang baik merupakan gambaran tuntutan terhadap kualitas pelayanan sebagai instansi pemberi pelayanan, sehingga terwujud sebagai pusat pelayanan infrastruktur dan kawasan permukiman mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan profesional melalui kerja tim yang kompak.

Isu strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai berdasarkan analisis situasi lingkungan eksternal dan internal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaah Visi, Misi dan Program pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

Faktor Penghambat		Faktor Pendorong	
Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
1. Keterbatasan jumlah rusunawa	1. Keterbatasan akses MBR terhadap rumah layak huni	1. Semakin besarnya kewenangan daerah untuk mengembangkan program Perumahan dan Permukiman	1. Program Nasional yang mendukung Program Pembangunan di Kota/Kabupaten.
2. Keterbatasan penyediaan rumah bagi korban bencana/relokasi	2. Keterbatasan kemampuan akses MBR terhadap rumah swadaya	2. Ketersediaan lahan pengembangan permukiman penduduk	2. Program Nasional yang mendukung
3. Keterbatasan database perumahan dan permukiman dan PSU yang valid dan mutakhir		3. Potensi aset lahan daerah yang masih dapat digunakan dalam penyediaan PSU	3. Meningkatnya kerjasama antar sektor antar daerah dan antar lembaga dalam penanganan kawasan permukiman
4. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah sederhana sehat		4. Meningkatnya kerjasama pengembang perumahan dengan pemerintah daerah	
5. Keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU)			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya pencapaian Visi dan Misi kepala daerah (terutama misi ke-3). Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai pada tahun 2025 mencakup 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan.

Rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan DISPERKIM Kota Dumai TA 2025 Perubahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENCANA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																54.643.088.932,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							60.894.613.179,00	16.049.266.613,00	16.612.382.371,84	-44.282.230.807,16						54.643.088.932,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						60.894.613.179,00	16.049.266.613,00	16.612.382.371,84	-44.282.230.807,16						54.643.088.932,00		
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				100%	100%	9.152.470.932,00	6.256.255.356,00	4.386.786.361,75	-4.765.684.570,25					8.826.033.432,00		
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				7 Dokumen	3 Dokumen	91.367.323,00	14.063.000,00	6.581.500,00	-84.785.823,00					93.892.451,00		
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	50.349.000,00	9.863.000,00	6.581.500,00	-43.767.500,00					51.740.500,00		
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0 Laporan	41.018.323,00	4.200.000,00	0	-41.018.323,00					42.151.951,00		
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.364.411.400,00	3.027.180.000,00	3.077.332.540,00	-1.287.078.860,00					4.501.613.300,00		
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.334.202.000,00	2.996.970.600,00	3.068.027.840,00	-1.266.174.160,00					4.470.569.000,00		
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.209.400,00	30.209.400,00	9.304.700,00	-20.904.700,00					31.044.300,00		

Disperkim dan stakeholder terkait

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENCANA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	33.935.226,00	33.935.226,00	19.805.613,00	-14.129.613,00			-	-			34.873.097,00
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.304.762,00	10.304.762,00	9.451.381,00	-853.381,00			-	-			10.589.556,00
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.304.762,00	10.304.762,00	4.702.381,00	-5.602.381,00			-	-			10.589.556,00
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	13.325.702,00	13.325.702,00	5.651.851,00	-7.673.851,00			-	-			13.693.985,00
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	122.595.767,00	76.347.767,00	0	-122.595.767,00			-	-			125.983.958,00
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	21.897.767,00	21.897.767,00	0	-21.897.767,00			-	-			22.502.958,00
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	0 Orang	100.698.000,00	54.450.000,00	0	-100.698.000,00			-	-			103.481.000,00
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.221.581.783,00	457.383.330,00	202.975.368,25	-1.018.606.414,75			-	-			935.004.746,00
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	20.139.600,00	5.725.000,00	2.862.500,00	-17.277.100,00			-	-			20.696.200,00
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJIA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	206.047.806,00	75.194.063,00	51.123.597,08	-154.924.208,92			-	-		211.742.368,00	
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	72.049.419,00	40.005.000,00	17.746.710,67	-54.302.708,33			-	-		74.040.655,00	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	50.349.000,00	30.201.412,00	23.908.633,00	-26.440.367,00			-	-		51.740.500,00	
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.357.934,00	5.025.000,00	4.242.500,00	-4.115.434,00			-	-		8.588.923,00	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	864.638.024,00	301.232.855,00	103.091.427,50	-761.546.596,50			-	-		568.196.100,00	
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				45 Unit	8 Unit	1.373.350.400,00	1.195.592.600,00	129.360.000,00	-1.243.990.400,00			-	-		1.066.708.800,00	
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0	0	-150.000.000,00			-	-		150.000.000,00	
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	0 Unit	90.628.200,00	65.790.000,00	0	-90.628.200,00			-	-		93.132.900,00	
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	8 Unit	181.256.400,00	129.802.600,00	129.360.000,00	-51.896.400,00			-	-		186.265.800,00	
	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENCANA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	951.465.800,00	1.000.000.000,00	0	-951.465.800,00			-	-			637.310.100,00
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4 Laporan	3 Laporan	1.130.971.233,00	880.163.433,00	819.035.340,50	-311.935.892,50			-	-			1.436.722.980,00
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.417.517,00	5.417.517,00	4.508.758,50	-908.758,50			-	-			5.485.850,00
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.767.800,00	18.000.000,00	19.680.000,00	-41.087.800,00			-	-			63.829.100,00
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	63.439.740,00	63.439.740,00	0	-63.439.740,00			-	-			65.193.030,00
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.001.346.176,00	793.306.176,00	794.846.582,00	-206.499.594,00			-	-			1.302.215.000,00
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48 Unit	29 Unit	814.257.800,00	571.590.000,00	131.696.000,00	-682.561.800,00			-	-			631.234.100,00
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	7 Unit	201.396.000,00	191.670.000,00	91.708.000,00	-109.688.000,00			-	-			206.962.000,00
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	4 Unit	150.000.000,00	44.570.000,00	20.988.000,00	-129.012.000,00			-	-			150.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	18 Unit	100.698.000,00	35.350.000,00	19.000.000,00	-81.698.000,00			-	-			103.481.000,00
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0 Unit	362.163.800,00	300.000.000,00	0	-362.163.800,00			-	-			170.791.100,00
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE PENYEDIAAN REHABILITASI, RUMAH KHUSUS DAN PSU BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA				100%	100%	2.550.000.000,00	1.405.000.000,00	1.054.191.596,00	-1.495.808.404,00							1.950.000.000,00
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota				5 Dokumen	4 Dokumen	350.000.000,00	290.000.000,00	175.131.946,00	-174.868.054,00							350.000.000,00
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																	
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	66.221.500,00	-33.778.500,00							100.000.000,00
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																	
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00	-38.000.000,00							50.000.000,00
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																	
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	20.000.000,00	13.232.000,00	-36.768.000,00							50.000.000,00
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENCANA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0	-100.000.000,00							100.000.000,00
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	83.678.446,00	33.678.446,00							50.000.000,00
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	39.103.400,00	-60.896.600,00							100.000.000,00
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																	
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	39.103.400,00	-60.896.600,00							100.000.000,00
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota				34 Unit Rumah	10 Unit Rumah	1.900.000.000,00	1.015.000.000,00	833.325.000,00	-1.066.675.000,00							1.300.000.000,00
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				15 Unit Rumah	3 Unit Rumah	700.000.000,00	465.000.000,00	310.900.000,00	-389.100.000,00							700.000.000,00
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				19 Unit Rumah	7 Unit Rumah	1.200.000.000,00	550.000.000,00	522.425.000,00	-677.575.000,00							300.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0	0	0	0							300.000.000,00
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang menerima pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota				2 Dokumen	10 Rumah Tangga	200.000.000,00	50.000.000,00	6.631.250,00	-193.368.750,00							200.000.000,00
	1.04.02.2.04.0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah				19 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	50.000.000,00	20.000.000,00	6.631.250,00	-43.368.750,00							50.000.000,00
	1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	10.000.000,00	0	-50.000.000,00							50.000.000,00
	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	10.000.000,00	0	-50.000.000,00							50.000.000,00
	1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah				15 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	50.000.000,00	10.000.000,00	0	-50.000.000,00							50.000.000,00
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0							0
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENCANA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0							0
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI				77,87%	30,92%	22.801.158.017,00	3.143.637.743,00	2.592.477.157,51	-20.208.680.859,49							21.282.029.420,00
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha				7 Dokumen	3 Dokumen	1.471.158.017,00	350.000.000,00	491.148.850,00	-980.009.167,00							1.152.029.420,00
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				6 Dokumen	2 Dokumen	1.140.000.000,00	200.000.000,00	304.371.850,00	-835.628.150,00							801.813.000,00
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	131.158.017,00	50.000.000,00	29.275.000,00	-101.883.017,00							150.216.420,00
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	22.760.000,00	-77.240.000,00							100.000.000,00
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	100.000.000,00	50.000.000,00	134.742.000,00	34.742.000,00							100.000.000,00
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha				168,76 Ha	0,12344 Ha	21.330.000.000,00	2.793.637.743,00	2.101.328.307,51	-19.228.671.692,49							20.130.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENCANA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				285 Unit Rumah	21 Unit Rumah	11.800.000.000,00	1.146.070.175,00	770.757.701,00	-11.029.242.299,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN-TEMATIK					11.000.000.000,00
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	50.000.000,00	28.395.000,00	-471.605.000,00							500.000.000,00
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	12.450.000,00	-17.550.000,00							30.000.000,00
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				168,76 Ha	0,12344 Ha	3.200.000.000,00	0	119.928.030,51	-3.080.071.969,49							3.200.000.000,00
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				74 Unit	13 Unit	5.800.000.000,00	1.567.567.568,00	1.169.797.576,00	-4.630.202.424,00							5.400.000.000,00
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PENINGKATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA DALAM BENTUK RUMAH LAYAK HUNI				80%	60,63%	10.200.000.000,00	2.413.186.814,00	2.688.235.819,00	-7.511.764.181,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.800.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota				160 Unit	25 Unit	10.200.000.000,00	2.413.186.814,00	2.688.235.819,00	-7.511.764.181,00							6.800.000.000,00
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				78 Unit Rumah	13 Unit Rumah	3.500.000.000,00	888.571.429,00	605.247.714,00	-2.894.752.286,00							3.300.000.000,00
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				82 Unit	12 Unit	6.500.000.000,00	1.494.615.385,00	2.065.731.870,00	-4.434.268.130,00							3.300.000.000,00
	1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh																	
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	30.000.000,00	17.256.235,00	-182.743.765,00							200.000.000,00
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				78,57%	78,57%	16.190.984.230,00	2.831.186.700,00	5.890.691.437,58	-10.300.292.792,42							15.785.026.080,00
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan				22 Lokasi	4 Lokasi	16.190.984.230,00	2.831.186.700,00	5.890.691.437,58	-10.300.292.792,42							15.785.026.080,00
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				6 Dokumen	1 Dokumen	857.964.500,00	0	84.950.000,00	-773.014.500,00							100.000.000,00
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				22 Lokasi	4 Lokasi	11.500.000.000,00	2.701.186.700,00	5.754.208.329,58	-5.745.791.670,42							11.800.000.000,00
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	433.019.730,00	80.000.000,00	42.185.500,00	-390.834.230,00							485.026.080,00
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU																	
			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				4 Kelompok	0 Kelompok	200.000.000,00	30.000.000,00	0	-200.000.000,00							200.000.000,00
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																	
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				16 Lokasi	0 Lokasi	3.000.000.000,00	0	0	-3.000.000.000,00							3.000.000.000,00
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																	
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	20.000.000,00	9.347.608,00	-190.652.392,00							200.000.000,00
6.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan				0%	0%	0	0	0	0							0

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENCANA	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0							0
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0							0
J U M L A H									60.894.613.179,00	16.049.266.613,00	16.612.382.371,84	-44.282.230.807,16						54.643.088.932,00	

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai menyadari bahwa masih banyak kekurangan/kelemahan yang harus diperbaiki untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dalam hal merencanakan serta pelaksanaan program dan kegiatan guna untuk mengetahui penyebab dari kekurangan/kelemahan sebagai umpan balik/*feed back* dari apa yang telah dan akan dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Disperkim Kota Dumai sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Disperkim Kota Dumai memiliki Urusan Wajib yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan fasilitasi pembangunan perumahan baik rumah susun maupun rumah tinggal biasa dalam rangka pemenuhan backlog perumahan.
3. Program Kegiatan yang diusulkan lebih diprioritaskan untuk pemulihan perekonomian masyarakat yang diarahkan pada program-program yang bisa menunjang Penuntasan Kemiskinan Ekstrem dan *Stunting* di Kota Dumai.
4. Perlunya memprioritaskan perencanaan pada kegiatan Pengentasan Kawasan Kumuh di Kota Dumai
5. Perlunya memprioritaskan perencanaan melakukan percepatan penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang
6. Koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam menentukan kebijakan mekanisme penganggaran dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. 73 Renja 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam menentukan kebijakan mekanisme penganggaran dalam pelaksanaan dan pelayanan bidang pertanahan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan dan program prioritas berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, di mana dokumen Rencana Kerja ini dibuat guna memudahkan proses pencapaian target kinerja kegiatan yang menunjang pelayanan masyarakat yang tepat sasaran dan ikut memajukan pembangunan secara nasional.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Dumai, maka pada tahun anggaran 2025 Perubahan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Dumai Kota Dumai melakukan evaluasi kembali terhadap perencanaan dan penganggaran sehingga dilakukan perubahan target dan indikator beserta pendanaan program kerja, yang terdiri dari 5 (lima) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan. Program kerja tersebut akan menjadi acuan bagi setiap bidang dalam menjalankan rencana aksi pelaksanaan kegiatan di mekanisme perubahan, dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien dalam merealisasikan target dan indikator beserta pendanaan program kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 Perubahan.

Program kerja tersebut akan menjadi acuan bagi setiap bidang-bidang dalam menjalankan rencana aksi pelaksanaan kegiatan dengan harapan dapat direalisasikan secara efektif dan efisien guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Dumai

أَمِين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Dumai, 21 Juli 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA DUMAI,**



SUHERMAN, S.Sos
Pembina Tk. I / IV.b
NIP.19680715 199903 1 003